

**POLITIK IDENTITAS PERSPEKTIF HADIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Ilmu Hadist

Oleh

**CUT NA ALNIDAL**

**NIM: 3042020004**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
PRODI ILMU HADIST  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2025 M / 1446 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Politik Identitas Perspektif Hadis**". An. Cut Na Alnidal, NIM 3042020004 Program Studi Ilmu Hadist telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa pada tanggal 06 Februari 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadist.

Langsa, 06 Februari 2025

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Program Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Pembimbing I



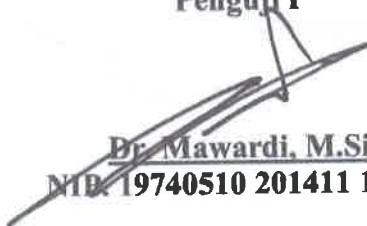
Saifuddin, S.Ag, MA  
NIP. 19751114 200901 1 003

Pembimbing II



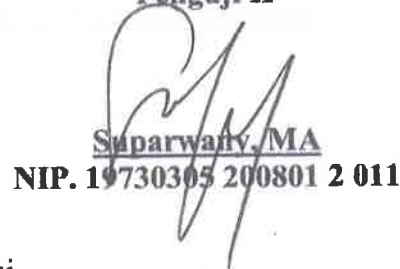
Dr. Mulizar, M.Th  
NIP. 19881210 202321 1 014

Penguji I



Dr. Mawardi, M.Si  
NIP. 19740510 201411 1 002

Penguji II



Suparwan, MA  
NIP. 19730305 200801 2 011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
IAIN Langsa



Dr. T. Wildan, MA  
NIP. 19841128 201903 1 002

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis**

**Oleh:**

**CUT NA ALNIDAL**  
**3042020004**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah**

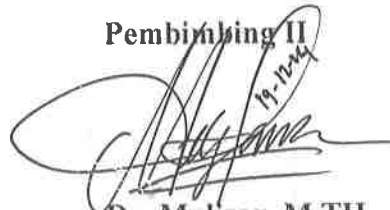
**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



**Saifuddin, S.Ag, MA**  
**NIP. 19751114 200901 1 003**

**Pembimbing II**



**Dr. Mulizar, M.TH**  
**NIP. 19881210 202321 1 014**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Na Alnidal  
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 19 Oktober 2001  
Fakultas/Program Studi : FUAD/ Ilmu Hadis  
Alamat : Desa Paya Bujok Beuramoe Kec. Langsa Barat  
Kota Langsa

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **"Politik Identitas Perspektif Hadis"**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, Januari 2025



*Reuy*  
CUT NA ALNIDAL  
NIM. 3042020004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Barang Siapa yang Keluar Rumah untuk Mencari Ilmu, Maka Ia berada di Jalan Allah Hingga Ia Pulang”.**

**(HR. Tirmidzi)**

**“Semangat dari kedua orang tua, adik dan Sahabat-sahabat merupakan kekuatan terbesarku”**

**“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, keluarga, keponakan dan teman terdekat yang tiada hentinya mendoakan dan mensupport saya agar pendidikan ini segera terselesaikan dan ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi saya pribadi dan masyarakat”**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— 	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

### b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي ' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

**d. Ta marbūtah.**

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al sertabacaankedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**f. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

## g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

## h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| - Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn   | : وان الله اهو خير الر ازقين |
| - Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn    | : وان الله اهو خير الر ازقين |
| - Faaufū al-kailawa al-mīzāna       | : فاوفو الكيل والميزان       |
| - Faaufū al-kailawal-mīzāna         | : فاوفو الكيل والميزان       |
| - Ibrāhīm al-Khalīl                 | : ابراهيم الخليل             |
| - Ibrāhīmul-Khalīl                  | : ابراهيم الخليل             |
| - Bismillāhimajrehāwamursāhā        | : بسم الله مجر اها ومر سها   |
| - Walillāhi 'alan-nāsihiju al-baiti | : والله على الناس حخ البيت   |

## i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan hurufawal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedomantranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Politik Identitas Perpektif Hadis.” untuk memperoleh gelar sarjana di Kampus IAIN Langsa ini. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Saw, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini dan telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung penulis mempunyai semangat yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Mawardi Siregar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan study tepat waktu.

3. Bapak Saifuddin, S.Ag., MA. selaku pembimbing I dan Dr. Mulizar, M. TH selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hadis, Bapak Dr. Mulizar, M.TH beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Para Dosen di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Ayahanda T. Bahruni dan Ibunda Zakiah yang telah mendukung dan memberikan doa terbaik.
7. Seluruh abang, adik yang senantiasa memberikan motivasi hingga selesainya penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat saya mahasiswa/i jurusan Ilmu Hadis yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Langsa, Januari 2025  
Penulis

Cut Na Alnidal

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PESETUJUAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Terdahulu .....	8
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II POLITIK IDENTITAS</b> .....	<b>24</b>
A. Ruang Lingkup Politik Identitas .....	24
B. Sejarah Politik Identitas di Indonesia .....	28
C. Bahaya Penyalahgunaan Politik Identitas .....	30
D. Politik Identitas yang Relevan.....	36
<b>BAB III HADIST-HADIST YANG BERHUBUNGAN DENGAN POLITIK IDENTITAS</b> .....	<b>39</b>
A. Hadis Tentang Kepemimpinan Politik Non-Muslim .....	39
B. Hadis Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan .....	40
C. Hadis Tentang Interaksi dengan Non Muslim .....	44
D. Hadis Tentang Persaudaraan .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
A. Bentuk Politik Identitas Perspektif Hadits.....	49
B. Politik yang Relevan Perspektif Hadits .....	56
C. Analisis Hasil Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Cut Na Alnidal, 2024, Politik Identitas Perspektif Hadis. Skripsi Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk politik identitas perspektif hadits dan untuk mengetahui politik yang relevan perspektif hadits. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan segala jenis informasi baik dari sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan fenomena yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa politik identitas perspektif hadits yaitu menunjukkan kesetaraan, tidak melihat terhadap gender, boleh berinteraksi dengan non muslim, tidak membedakan interaksi antar agama dan persaudaraan. Adapun politik relevan Perspektif Hadits berdasarkan 5 asas: Pertama, asas keadilan berdasarkan hadis riwayat Ahmad 10742. Kedua, asas musyawarah berdasarkan hadis riwayat Ahmad 173. Ketiga, asas persatuan dan kesatuan berdasarkan hadis riwayat Bukhari 459 dan 4685. Keempat, asas akhlak dalam politik berdasarkan hadis riwayat Muslim 3404 dan Bukhari 36 29. Kelima, asas mengutamakan kepentingan umum berdasarkan hadis riwayat Ibnu Maja 2341 dan Bukhari 6613.

**Kata Kunci: Politik Identitas Perspektif Hadis**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang diketahui, heterogenitas bangsa Indonesia adalah karakteristik yang sangat penting untuk dipahami dalam politik. Al-Quran dan hadis menekankan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kesetaraan, yang harus menjadi landasan dalam menjalankan politik dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.<sup>1</sup> Dalam konteks politik Indonesia yang mencerminkan keragaman etnis, agama, dan budaya, penghormatan terhadap identitas dan keberagaman merupakan nilai penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Menciptakan politik yang inklusif dan adil adalah tujuan yang harus diperjuangkan dalam upaya mencapai kesuksesan baik di dunia maupun akhirat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis dalam politik selalu merupakan subjek diskusi dan perdebatan yang kompleks. Dalam situasi politik apa pun, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama dan keadilan sosial serta kerjasama antar beragam kelompok adalah kunci untuk mencapai kesuksesan politik yang berkelanjutan dan damai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indra Efendi & Charles, *Politik Identitas Dalam Perspektif Alqur'an Dan Hadits*, Jurnal: Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022, h. 431

<sup>2</sup> Indra Efendi & Charles, *Politik Identitas Dalam Perspektif Alqur'an Dan Hadits*, Jurnal : Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia,... h. 432

Berbicara mengenai politik identitas, politik identitas adalah konsep yang terdiri dari dua kata, yaitu "politik" dan "identitas." Politik: Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*" atau "*polis*," yang berarti "kota" atau "negara." Dalam konteks modern, politik merujuk pada berbagai kegiatan dan proses dalam sebuah sistem politik yang terkait dengan menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan dalam sistem tersebut. Ini mencakup berbagai aspek seperti pembuatan kebijakan, pemilihan umum, hubungan internasional, dan sebagainya.<sup>3</sup> Identitas: Secara etimologis, identitas berasal dari kata "*identity*," yang merujuk pada ciri atau karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok tertentu. Identitas dapat melibatkan berbagai faktor seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, dan faktor-faktor lain yang membedakan satu individu atau kelompok dari yang lain.<sup>4</sup>

Jadi, politik identitas adalah konsep yang mengacu pada bagaimana faktor-faktor identitas individu atau kelompok, seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual, dapat memengaruhi atau terlibat dalam proses politik. Ini mencakup bagaimana individu atau kelompok menggunakan identitas mereka untuk mendukung atau mempengaruhi kebijakan politik, pemilihan umum, dan aspek-aspek politik lainnya. Politik identitas sering kali melibatkan upaya untuk memahami dan memanfaatkan identitas dalam konteks politik, baik untuk mendukung tujuan politik tertentu atau untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok identitas tertentu.

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002), h. 34

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,... h. 34

Terkait politik identitas, akhir-akhir ini terjadi fenomena unik pada proses kontestasi politik di Indonesia, dimana salah satu bakal calon presiden (capres) dinilai oleh sebagian pengamat politik dinyatakan melakukan politik identitas. Hal yang ia lakukan adalah melaksanakan shalat dan membersihkan tempat wudhu' sembari ditayangkan di salah satu channel televisi.

Penggunaan identitas agama oleh partai politik dan elit politik untuk menentukan pencalonan Pilkada maupun pilpres diharapkan dapat memberikan insentif elektoral bagi pasangan calon. Sentimen keagamaan dalam mengidentifikasi segmen pemilih tertentu terbukti efektif dalam mendapatkan dukungan untuk para calon, menggantikan pertimbangan yang rasional dan semangat nasionalisme.

Namun, manfaat elektoral dari politik identitas yang dimainkan oleh partai politik dan pendukungnya seringkali menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat yang beragam, baik dari segi etnis maupun agama. Ketakutan akan perpecahan dan potensi konflik politik di berbagai daerah. Potensi destabilisasi politik negara akibat politik identitas menjadi perhatian semua pihak dan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan kajian dalam ilmu politik.

Hadis politik identitas mengacu pada hadis-hadis atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh politik atau masyarakat yang terkait dengan isu-isu identitas, seperti agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana individu atau kelompok didefinisikan dalam masyarakat. Hadis politik identitas sering kali digunakan dalam

konteks perdebatan politik, perubahan sosial, atau perjuangan hak-hak individu dan kelompok.

Contoh hadis politik identitas dapat mencakup pernyataan politisi tentang masalah imigrasi, hak-hak LGBT, diskriminasi rasial, agama dalam politik, atau isu-isu yang berkaitan dengan identitas gender. Hadis politik identitas dapat memengaruhi opini publik, mendefinisikan arah kebijakan pemerintah, dan memicu perdebatan dan perubahan sosial.

Berikut salah satu contoh hadis politik identitas : Contoh hadis politik identitas dapat mencakup pernyataan politisi tentang masalah imigrasi, hak-hak LGBT, diskriminasi rasial, agama dalam politik, atau isu-isu yang berkaitan dengan identitas gender. Hadis politik identitas dapat memengaruhi opini publik, mendefinisikan arah kebijakan pemerintah, dan memicu perdebatan dan perubahan sosial.

Berikut salah satu contoh hadis politik identitas :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari ['Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Wajib setiap orang untuk mendengar dan taat, baik terhadap sesuatu yang dia suka atau benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan taat."* (H.R. Muslim: 3423).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim, jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, 1918), tt.

Berdasarkan hadis di atas, sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa setiap orang wajib mentaati perintah dari seorang pemimpin, selama pemimpin tersebut memerintahkan dalam kebaikan dan ketaatan. Akan tetapi, jika pemimpin tersebut memerintahkan kepada kemaksiatan, maka gugurlah kewajiban tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, banyak para pemimpin di Indonesia melakukan pencitraan terhadap rakyatnya. Sebagai ilustrasi, para pemimpin dan wakil rakyat, di hadapan rakyatnya peduli dengan rakyatnya, akan tetapi jika dibelakang rakyatnya melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia.

Pemilihan pemimpin dan kualifikasi mereka dalam Islam adalah topik yang mendalam, dan banyak perdebatan dan variasi dalam pandangan dan praktik di seluruh dunia Muslim. Oleh karena itu, pemahaman tentang hadis ini mungkin bervariasi tergantung pada konteks dan sudut pandang yang diambil. Dalam penelitian ini, penting untuk melibatkan para pakar agama, cendekiawan Islam, dan ilmuwan sosial yang kompeten. Mereka dapat membantu menganalisis hadis yang relevan dengan politik identitas, dan juga memahami konteks sejarah dan budaya di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pedoman kepada masyarakat, pemimpin politik, dan ulama dalam memahami peran agama dalam politik identitas, serta untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di NKRI.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merasa perlu untuk meneliti penelitian ini dengan judul **“Politik Identitas Perspektif Hadis”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk politik identitas perspektif hadits?
2. Bagaimana politik yang relevan perspektif hadits?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk politik identitas perspektif hadits.
- b. Untuk mengetahui politik yang relevan perspektif hadits.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, karya ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang politik identitas dalam perspektif hadis.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami dan mengetahui politik identitas dalam perspektif hadis.
- c. Dalam aspek agama, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kekuatan dan keteguhan iman kita sebagai orang yang beriman.

## **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah-istilah kunci dalam judul penelitian adalah langkah yang sangat penting dalam merancang sebuah penelitian. Hal ini membantu untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan istilah dan memastikan bahwa pembaca

memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, maka penulis menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

### 1. Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok, ras, etnis, suku, negara, budaya, agama, atau yang lain untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politik identitas dalam praktiknya sangat bisa terlihat karena didasarkan pada kesamaan identitas suatu kelompok ditengah masyarakat yang plural. Praktik politik identitas juga tak jarang menjadi sumber konflik ditengah masyarakat, dimana masyarakat yang merasa kelompoknya superior melawan kelompok inferior ataupun kelompok mayoritas melawan kelompok minoritas. Penjabaran dari identitas politik menjadi politik identitas sendiri adalah identitas politik yang dianut oleh warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas sendiri lahir dari sebuah kelompok sosial yang seakan merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Hal ini yang menjadi dasar mengapa politik identitas lahir.<sup>6</sup>

### 2. Perspektif

Perspektif adalah cara seseorang melihat dan memahami dunia berdasarkan asumsi, keyakinan, nilai-nilai, dan gagasan yang mereka miliki. Ini memengaruhi cara seseorang menginterpretasikan informasi, membuat keputusan, dan bertindak

---

<sup>6</sup> Indah Sari, *Politik Identitas Komunitas Bali Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwasin*, Indonesian Political Science Review, volume 1.1 (2020), h. 38-48

dalam berbagai situasi. Perspektif adalah konsep penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, filosofi, psikologi, dan bahkan ilmu alam.<sup>7</sup>

### 3. Hadis

Dalam definisi standar mengenai hadis di kalangan ahli-ahli hadis, hadis diartikan sebagai, “Pernyataan, perbuatan, persetujuan diam-diam, atau sifat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw.”<sup>8</sup> Dalam Islam, hadis adalah sumber penting hukum Islam selain dari Al-Quran. Hadis-hadis tersebut digunakan untuk menjelaskan, memperjelas, atau menguraikan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan untuk memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan umat Islam. Hadis-hadis ini diteruskan melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi dan dikumpulkan, dikelola, dan dianalisis oleh para ulama hadis untuk memastikan keasliannya.

## E. Kajian Terdahulu

Memang benar bahwa karya-karya tulis yang berkaitan dengan tema politik identitas dari perspektif hadis telah banyak dihasilkan, terutama dalam bidang studi agama dan ilmu sosial. Karya-karya ini sering kali membahas hubungan antara identitas agama, budaya, atau etnis dengan politik, dengan menggunakan hadis sebagai salah satu sumber referensi utama.

---

<sup>7</sup> Meida Rabia Sihite & Linda Astuti Rangkuti, *Perspektif Mahasiswa dan Dosen Terhadap Pembelajaran Daring di Era 4.0*. Jurnal : Lectura Vol. 14, No, 1, Februari 2023, h. 30

<sup>8</sup> Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭaḥ al-Ḥadīṣ* (Riyad: Maktabat al-Ma’ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1431/2010), h. 17

Di antara karya-karya tersebut adalah *pertama*, skripsi karya Muhammad Muis.<sup>9</sup> Adapun hasil penelitiannya adalah Al-Qur'an adalah teks suci dalam agama Islam yang berisi ajaran dan panduan moral untuk umat Islam. Meskipun istilah "identitas" mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, teks tersebut berbicara tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana individu harus mengidentifikasi diri mereka dalam konteks agama, etnisitas, dan sosial.

Pertanyaan tentang pemimpin dalam Islam dan apakah pemimpin harus laki-laki atau perempuan, Muslim atau non-Muslim, dan dari ras atau adat tertentu adalah masalah yang telah diperdebatkan dalam sejarah Islam. Al-Qur'an dan hadis (tradisi) Nabi Muhammad menyediakan kerangka kerja untuk pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam, tetapi detailnya sering diperdebatkan dan dipahami berbeda oleh berbagai aliran dan ulama Islam. Tentang identitas individu dalam Islam, Al-Qur'an menekankan pentingnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tanpa memandang suku, ras, atau asal usul etnis.

Adapun persamaan judul di atas dengan judul yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang politik identitas. Sedangkan perbedaannya, judul diatas menggunakan perspektif al-Qur'an sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hadis.

*Kedua*, skripsi Achmad Junaedy Muchtar.<sup>10</sup> Adapun hasil penelitiannya adalah Pandangan atau tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas dalam

---

<sup>9</sup> Muhammad Muis, *Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)*, Skripsi : Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ptiq Jakarta 2020, h. 63

<sup>10</sup> Achmad Junaedy Muchtar, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019*", Skripsi : Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, h. 67

pemilihan presiden Tahun 2019 tidak diizinkan menurut hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi individu atau mazhab Islam tertentu. Fiqh siyasah adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, tinjauan ini akan bergantung pada perspektif dan pendapat yang berbeda dari para cendekiawan Islam.

Namun, perlu diingat bahwa pendapat tentang politik identitas dalam Islam dapat berbeda-beda. Beberapa mungkin berpendapat bahwa politik identitas dalam pemilihan dapat menjadi cara untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok tertentu, asalkan itu tidak melanggar nilai-nilai Islam secara substansial.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa konteks dan situasi politik setiap negara atau daerah mungkin berbeda, dan pendekatan fiqh siyasah dapat beradaptasi dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, dalam hal ini, pandangan seorang cendekiawan atau otoritas agama tertentu mungkin memiliki wewenang dalam memberikan pandangan resmi tentang apakah politik identitas dalam pemilihan presiden 2019 sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Adapun persamaan judul di atas dengan judul yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang politik identitas. Sedangkan perbedaannya, judul di atas meninjau politik identitas menggunakan tinjauan Fiqh Siyasah dengan lebih menitik fokuskan apa hukum dari politik identitas itu sendiri, sedangkan penelitian ini memfokuskan peninjauan politik identitas lewat perspektif hadis.

*Ketiga*, Jurnal karya Indra Efendi dan Charles.<sup>11</sup> Adapun hasil penelitiannya adalah mendeskripsikan pandangan dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam

---

<sup>11</sup> Indra Efendi dan Charles, *Politik Identitas Dalam Perspektif Alqur'an Dan Hadits*, Jurnal : Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022, h. 431

berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, kepemimpinan memiliki beberapa karakteristik penting yang dapat diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Beberapa poin penting dalam pandangan ini adalah: Syarat Pemimpin dalam Islam: Muslim (memeluk agama Islam), Laki-laki, Berpengetahuan (memiliki ilmu pengetahuan), Adil dalam tindakan dan keputusan, memiliki kemampuan dan kecakapan, Sehat secara jasmani dan Rohani. Kepemimpinan adalah Keharusan: Dalam Islam, kepemimpinan dianggap sebagai suatu kewajiban. Kepatuhan kepada Pemimpin: Orang-orang Muslim diwajibkan untuk taat kepada pemimpin mereka, kecuali jika pemimpin tersebut memerintahkan perbuatan dosa (maksiat). Satu Pemimpin: Prinsip satu pemimpin diutamakan, untuk menghindari potensi perpecahan dan konflik yang mungkin muncul jika terdapat lebih dari satu pemimpin. Penunjukan oleh Rakyat: Pemimpin seharusnya ditunjuk atau dipilih oleh rakyat atau umat Islam. Menjadi Pemimpin tanpa Daulat Diri: Memproklamasikan diri sebagai pemimpin dianggap tidak etis, sehingga pemimpin.

Seharusnya diberi amanah oleh rakyat atau entitas yang berwenang. Pemimpin Laki-Laki: Pemimpin dalam Islam seharusnya berasal dari kalangan laki-laki. Kepemimpinan oleh Suku Quraisy: Terdapat pandangan bahwa kepemimpinan sebaiknya ada dalam suku Quraisy, yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW.

Adapun persamaan judul di atas dengan judul yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang politik identitas. Sedangkan perbedaannya, judul di atas meninjau politik identitas melalui perspektif al-Qur'an dan hadis sekaligus

dan menfokuskan pada kriteria pemimpin dalam Islam, sedangkan penelitian ini memfokuskan peninjauan politik identitas lewat perspektif hadis dan mengulik lebih lanjut bagaimana kualitas hadis yang berkaitan dengan politik identitas.

*Keempat*, Jurnal karya Ratna Istianah dan Saehudin.<sup>12</sup> Adapun hasil penelitiannya adalah Pada dasarnya, simpulan tersebut menyiratkan bahwa perilaku politik kiai (pemimpin agama Islam) di Sukabumi dipengaruhi oleh identitas calon peserta Pemilu dan berkontribusi positif dalam membentuk perilaku politik kiai selama Pemilu di Sukabumi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tokoh agama lebih cenderung mengikuti identitas agama dan keyakinan yang sama daripada mempertimbangkan faktor kekerabatan atau kedaerahan dalam ekspresi perilaku politik mereka. Dengan kata lain, agama dan keyakinan yang sama menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku politik kiai di Sukabumi dalam konteks pemilihan umum.

Adapun persamaan judul di atas dengan judul yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang politik identitas. Sedangkan perbedaannya, judul diatas meninjau politik identitas melalui di Kota Sukabumi dengan subjeknya berfokus pada Kiai (tokoh agama) di Sukabumi, sedangkan penelitian ini memfokuskan peninjauan politik identitas lewat perspektif hadis dan mengulik lebih lanjut bagaimana kualitas hadis yang berkaitan dengan politik identitas.

---

<sup>12</sup> Ratna Istianah dan Saehudin, *Politik Identitas Dan Perilaku Politik Kiai Di Kota Sukabumi Menjelang Pemilihan Umum 2024*, Jurnal : Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 4 No. 2, Mei 2023, h. 233

*Kelima*, Skripsi karya Epi Aresih Tansal.<sup>13</sup> Adapun hasil penelitiannya adalah Pembingkai Berita Identitas Politik: Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com menganggap isu politik identitas sebagai masalah yang berpotensi mengancam persatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia yang multikultural selama Pemilihan Presiden 2019. Hal ini terkait dengan adanya ancaman populisme dan konflik identitas di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, hampir semua berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com cenderung menggambarkan isu politik identitas elektoral. Kemudian diksi dan kata provokatif: Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teks-teks berita yang disajikan oleh Kompas.com memiliki kecenderungan untuk menggunakan diksi (pilihan kata-kata) dan kata-kata provokatif terhadap kelompok pemilih muslim. Berita tersebut mungkin mengikuti satu sudut pandang tertentu dan hanya melibatkan satu narasumber, yang biasanya berasal dari latar belakang pengamat politik, akademisi, atau praktisi politik. Ini berarti bahwa pemberitaan lebih dominan dalam konteks diskusi ilmiah daripada memberikan perspektif yang beragam.

Adapun persamaan judul di atas dengan judul yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang politik identitas. Sedangkan perbedaannya, judul di atas bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana media massa mengambil sudut pandang tertentu dalam pembingkai berita mengenai politik identitas, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik tertentu, sedangkan penelitian ini memfokuskan peninjauan politik

---

<sup>13</sup> Epi Aresih Tansal, *Representasi Isu Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 Pada Pemberitaan Kompas.Com (Analisis Framing Robert N. Entman)*, Skripsi : Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 98

identitas lewat perspektif hadis dan mengulik lebih lanjut bagaimana kualitas hadis yang berkaitan dengan politik identitas.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu konsep atau model yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan merumuskan pemahaman terhadap fenomena atau masalah yang akan diteliti dalam penelitian ilmiah. Kerangka teori tidak hanya sekadar alat, tetapi juga menjadi dasar atau landasan bagi penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan:

### **1. Teori Ilmu Ma'anil Hadis**

Secara etimologi 'Ulum' adalah bentuk jamak dari kata 'ilm' dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, 'ilm' merujuk kepada pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Dalam konteks Islam, 'ilm' sering kali digunakan untuk merujuk kepada pengetahuan agama, seperti ilmu agama atau ilmu pengetahuan Islam.

Jadi, *ma'ani* dalam konteks ini dapat diartikan sebagai keseluruhan konsep atau makna yang dapat diungkapkan melalui kata-kata dalam bahasa, dengan mempertimbangkan perasaan, daya imajinatif, dan persepsi rasional yang terlibat dalam proses komunikasi. Ini adalah konsep penting dalam pemahaman bahasa dan sastra.

Ilmu al-Ma'anil Hadis adalah disiplin yang berfokus pada makna atau tujuan di balik suatu hadis. Ilmu ini mencoba untuk mengidentifikasi dan memahami maksud atau tujuan yang terkandung dalam suatu hadis. Ini mungkin melibatkan usaha untuk menggali apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW saat

menyampaikan hadis tersebut. Dalam upaya untuk mencapai pemahaman yang benar terhadap hadis, ilmu ini mendasarkan analisisnya pada kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini mencakup pemahaman tata bahasa dan makna kata-kata yang digunakan dalam hadis. Ilmu ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam mencari makna hadis. Hal ini penting karena hadis seringkali digunakan sebagai sumber hukum dalam Islam. Ilmu ini berusaha untuk memastikan bahwa makna yang ditemukan dalam hadis sesuai dengan konteks dan keadaan yang melibatkan Nabi Muhammad SAW. Ini dapat mencakup memahami situasi historis di mana hadis tersebut diucapkan.

Dengan pendekatan ini, ilmu *al-ma'anil hadis* bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis dan memastikan bahwa makna yang diambil dari hadis tersebut sesuai dengan aspek-aspek bahasa, hukum, dan konteks sejarah yang relevan.<sup>14</sup>

Menurut Mustaqim dalam bukunya konsep *ilmu ma'anil al-hadis* yang merupakan sebuah pendekatan untuk memahami hadis dalam konteks masa kini. Ilmu *ma'anil al-hadis* ini fokus pada pemahaman matan hadis dan bagaimana menghubungkannya dengan konteks zaman sekarang. Hal ini penting agar hadis yang disampaikan tetap relevan dan tidak kehilangan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Dengan demikian, ilmu *ma'anil al-hadis* membantu para ulama dan penceramah hadis untuk menginterpretasikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan menghubungkannya dengan kehidupan dan permasalahan masa kini. Dengan

---

<sup>14</sup> Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadis*, (Sidoarjo: Jitos Digital Press 2011), h. 272

<sup>15</sup> Abdul Maiid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. (Jakarta: Amzah, 2014), h. 134.

pendekatan ini, hadis-hadis tersebut dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, sehingga pesan-pesan moral dan petunjuk dalam hadis tetap bermanfaat bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Ilmu *ma'ani al-hadis* juga dikenal dengan istilah *fiqhal-hadist* atau *fahm al-hadist* yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan ilmu *ma'ani al-hadis* adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis Nabi Saw, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional.

## 2. Teori Maqashid al-Syariah

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqshud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).<sup>16</sup>

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam Maqashid al-Syariah, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (al-din) pada urutan pertama dan harta (al-mal) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih

---

<sup>16</sup>Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), h. 75

lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.<sup>17</sup>

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

#### 1) Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, dan lain-lain.

Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikategorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia. Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas tidak berarti

---

<sup>17</sup> Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 34

sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajjiyyat dan dharuriyyat.

## 2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. (3) memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

## 3) Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat.

Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

#### 4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan menikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khatabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan.

Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan perkawinan.

#### 5) Memelihara harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam.

Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Moh. Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 171-176

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, penting untuk memilih metode yang sesuai dengan objek kajian. Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode penelitian yang tepat memastikan bahwa penelitian berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari bentuknya jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk mengungkap makna, pola, dan konteks dari gejala atau masalah yang mereka teliti.<sup>19</sup> Sementara dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama.<sup>20</sup> Bahan pustaka yang dimaksud baik berupa buku, majalah, naskah-naskah, jurnal, catatan, kisah sejarah maupun dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan lainnya.<sup>21</sup>

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Metode ini digunakan

---

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 100

<sup>20</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 10

<sup>21</sup> Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandur Maju, 1996), h. 33

untuk merancang prosedur yang sistematis dan standar guna memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.. Langkah metode pengumpulan data ini dimulai dari mengumpulkan beberapa referensi yang terkait dengan tema. Adapun referensi atau sumber data tersebut terbagi menjadi dua, yakni;

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan hadis, yakni dengan mengumpulkan hadis yang membahas tentang politik praktis.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini bersifat bisa sebagai penjelas dan analisis dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab hadis, artikel, jurnal, yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Penulis dalam karya ini menggunakan Qutubut Sittah dan Qutubut tis'ah.

### **3. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penting dalam dunia penelitian dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan berbagai metode untuk mengelompokkan, mengorganisir, menginterpretasikan, dan mengevaluasi data untuk memahami pola, tren, hubungan, dan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau mengembangkan hipotesis.

Sebagai alat untuk menganalisa data-data tersebut, peneliti menggunakan teknik deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan data atau keadaan obyek/subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisa dan dibandingkan berdasarkan

kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.<sup>22</sup> Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang sistematis dan akurat. Sedang metode analisis adalah menganalisa data yang telah diperoleh dari data primer maupun sekunder kemudian dikumpulkan agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari semua data tersebut. Jadi, metode deskriptif-analitis adalah mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas problem yang dikemukakan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi adalah panduan yang menguraikan susunan atau struktur umum dari dokumen penelitian tersebut. Sistematika ini membantu pembaca atau penguji untuk memahami bagaimana skripsi diorganisasi dan apa yang akan dijelaskan dalam setiap bagian. Sistematika skripsi biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yang meliputi:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan gambaran keseluruhan isi skripsi ini secara global, yang di dalamnya memuat sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

*Bab kedua* merupakan landasan teori, bab kedua berisikan pembahasan terkait ap aitu Politik, manfaat politik, dampak politik dan politik identitas.

---

<sup>22</sup> Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 84

*Bab ketiga*, dalam bab ini dipaparkan tentang hadis-hadis yang membahas mengenai politik identitas.

*Bab keempat* dalam bab ini berisikan hasil penelitian berupa pandangan ulama terhadap politik identitas, takhrij hadis-hadis mengenai politik identitas serta analisis peneliti terkait politik identitas perspektif hadis.

*Bab kelima* penutup yang merupakan akhir rangkaian pembahasan yang berupa simpulan, saran-saran dan kalimat penutup skripsi ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Politik Identitas Perpektif Hadis**

Identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi, Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sementara itu, melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap.

Kalau dilihat dari pengertian dalam kajian sosiologi kontemporer, politik identitas tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang beku, tetap, tak berubah. Identitas dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial yang dibentuk terus-menerus, bahkan selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat oleh masyarakat. Merunut pada pengertian tersebut, Identitas akan selalu melapisi gerakan seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Dalam kajian sosiologi, etnisitas dibedakan dari ras, kelas, dan status sosial yang merupakan salah satu unsur stratifikasi sosial masyarakat.

Politik identitas yang diterapkan oleh Rasul berdasarkan syariah yang diturunkan Allah kepada beliau melalui perantara malaikan Jibril. Oleh karena itu tentunya politik identitas tersebut telah sesuai dengan fitrah sebagai muslim. Adapun bentuk-bentuk politik identitas yang diterapkan oleh Rasulullah melalui hadits beliau, antara lain:

## 1. Asas Kesetaraan

Asas kesetaraan dalam politik atau kesetaraan politik (*political equality*) adalah prinsip dasar demokrasi yang berarti semua warga negara dewasa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik.

Bentuk politik identitas asas kesetaraan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya:

Telah kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadhrah, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khotbah Rasulullah SAW di tengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda, "*Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab dan begitu juga bagi orang non Arab atas orang Arab. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan sebaliknya bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan.* (HR. Ahmad, 22391).<sup>42</sup>

Asbabul wurud hadis Asas Kesetaraan (Sebab-sebab datangnya hadis tentang prinsip kesetaraan) adalah konteks atau latar belakang yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis yang berkaitan dengan kesetaraan antara manusia, terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin mereka. Memahami asbabul wurud hadis ini penting untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW dan menghindari penafsiran yang keliru.

---

<sup>42</sup> Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif. tt)

Semua manusia hanya merupakan satu ras dimulai dengan pandangan bahwa seluruh manusia hanya berasal dari satu Tuhan dan satu ayah. Oleh karena itu, hadis ini menyatakan persaudaraan universal, atau tidak ada perbedaan hakiki yang membedakan satu individu diantara saudara kandungnya. Hal ini juga menegaskan bahwa yang membedakan satu manusia dengan manusia lainnya disisi Allah SWT hanyalah takwanya. Takwa adalah kepatuhan dengan perintah dan larangan Allah yang terdapat dibatin. Tidak ada yang bisa melihat takwa seorang insan, karena kebaikan hati langsung dilihat oleh Allah.

Hadis ini berfungsi sebagai landasan Islam untuk menolak segala bentuk *rasisme*, *tribalisme*, dan diskriminasi seperti orang Arab dan non Arab pada zaman Rasul, masyarakat sering kali memandang suku Arab berkuasa atas bangsa lain, sehingga, ia menolak anggapan itu secara langsung, mengingat bahwa Rasul adalah Arab sendiri, tetapi risalatnya adalah untuk umat manusia. Kulit putih dan kulit hitam, hadis ini menolak ketidak seimbangan ras berdasarkan skala kulit manusia, Rasulullah SAW menolaknya sangat tegas. Dengan posisi modern, hal itu dapat dipakai untuk melawan rasialisme global.

Hadis berpolitik ini memberikan prinsip dasar yang dapat dijadikan panduan dalam membangun sistem politik yang adil, inklusif, dan tidak diskriminatif. Sistem politik yang ideal adalah yang menghormati kesetaraan manusia yang berkeadilan sosial, dan mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam pandangan Islam, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjalankan nilai-nilai ini dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat dan Allah SWT.

## 2. Asas tidak Melihat Gender

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marjinalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Bentuk politik identitas asas tidak melihat gender, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: *Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah saw., bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri*

*raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang Wanita". (HR Bukhari No 4073).<sup>43</sup>*

Asbabul wurud (penyebab turunnya) hadis tentang larangan melihat aurat perempuan (laki-laki) adalah untuk mencegah fitnah dan menjaga kesucian. Hadis ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dilarang melihat aurat lawan jenisnya, serta dilarang memasuki kamar mandi atau tempat tidur tanpa izin dari yang bersangkutan.

Hadis ini menerangkan bahwa penduduk Persia telah memilih seorang wanita sebagai pemimpin mereka. Dalam hal ini, Rasulullah SAW secara keseluruhan mengomentari suatu keadaan politik ketika pemimpin negara atau kerajaan dijabat oleh seorang wanita. Jika memahami konteks sejarahnya, masyarakat pada masa itu dipimpin oleh norma patriarki yang sangat kuat.

Islam datang untuk memberikan kesetaraan di banyak sektor kehidupan. Ini bukan larangan mutlak bahwa wanita tidak bisa memimpin, melainkan lebih kepada peringatan bahwa kepemimpinan dalam keadaan tertentu atau dalam konteks tertentu, seperti dimasa itu, kurang menguntungkan bila dipimpin oleh wanita. Islam mengajarkan bahwa kualitas kepemimpinan tidak bergantung pada jenis kelamin seseorang, tetapi lebih kepada kemampuan dan akhlaknya.

Sehubungan dengan konteks ini hadis tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan atau keberuntungan suatu kaum tidak bergantung pada gender, tetapi pada kemampuan dan kualitas pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Untuk memahami lebih jauh dan dengan perspektif yang lebih luas, terutama dalam

---

<sup>43</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), h. 1086,

konteks modern, sangat penting untuk mempertimbangkan perubahan zaman dan penafsiran yang lebih kontekstual.

### 3. Asas boleh berinteraksi dengan non muslim

Perbedaan agama tidak bisa dijadikan alasan untuk berperilaku buruk, memusuhi dan memerangi pemeluk agama lain. Dengan demikian asas hubungan antara umat Islam dengan non-Muslim bukanlah peperangan dan konflik, melainkan hubungan tersebut didasari dengan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Islam memandang seluruh manusia, apa pun agama dan latar belakangnya, terikat dalam persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*) yang mengharuskan mereka saling menjaga hak-hak masing, mengasihi, tolong-menolong, berbuat adil dan tidak menzalimi yang lain.

Bentuk politik identitas pemimpin harus berinteraksi dengan non muslim, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami [Qais bin Hafsh] telah bercerita kepada kami [Abdul Wahid] telah bercerita kepada kami [Al Hasan bin 'Amru] telah bercerita kepada kami [Mujahid] dari ['Abdullah bin 'Amru radiallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa yang membunuh mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan"*. (HR Bukhari 2930).<sup>44</sup>

Asbabul wurud (sebab-sebab diturunkannya ayat) dari asas boleh berinteraksi dengan non-Muslim tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran

<sup>44</sup> Albukhari, Shahih, h. 1765

atau hadis. Namun, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang memungkinkan interaksi positif dengan non-Muslim, asalkan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar agama Islam.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *mu'ahad* berarti seorang non-Muslim yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Seperti ahli *dzimmah*, *musta'min*, dan kafir harbi. dalam hal ini nabi muhammad saw menegaskan betapa berat dosa membunuh *mu'ahad* dengan tidak mencium bau surga. Hal ini adalah bentuk peringatan keras agar seseorang tidak meremehkan pembunuhan atau kezaliman.

Berinteraksi dengan cara yang baik, seperti membantu mereka dalam urusan kemanusiaan atau saling tolong-menolong selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Menjaga hubungan baik dengan non-Muslim melalui perbuatan yang adil dan damai adalah bagian dari dakwah yang menunjukkan keindahan ajaran Islam. Dalam politik, keadilan menjadi dasar stabilitas dan perdamaian.

Pemimpin dan pejabat negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara, kezaliman terhadap pihak yang lemah seperti *mu'ahad* dapat memicu konflik, dan citra buruk negara di mata dunia. pemerintah yang menerapkan nilai ini dapat membangun hubungan harmonis dalam masyarakat dan membangun citra positif Islam di mata dunia. Dengan demikian hadis ini mengajarkan umat Islam untuk berinteraksi dengan non-Muslim berdasarkan penghormatan, dan perdamaian. Membunuh atau menzalimi mereka adalah sebuah larangan . ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjaga hak manusia, bertoleransi, dan mencegah konflik dalam kehidupan masyarakat.

#### 4. Asas tentang persaudaraan

Asas persaudaraan atau ukhuwah adalah prinsip dalam transaksi syariah yang menekankan pentingnya hubungan saling menguntungkan, saling percaya, dan saling menghargai. Asas ini juga mengharuskan adanya sikap saling membantu dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

Bentuk politik identitas tentang persaudaraan, sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdillah bin Numair]; Telah menceritakan kepada kami [Bapakku]; Telah menceritakan kepada kami [Zakaria] dari [Asy Sya'bi] dari [An Nu'man bin Bisyr] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)*" Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Al Hanzhali]; Telah mengabarkan kepada kami [Jarir] dari [Mutharrif] dari [Asy Sya'bi] dari [An Nu'man bin Bisyr] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa. (HR Muslim 4685)<sup>45</sup>

Asbabul wurud (penyebab turunnya) ayat tentang persaudaraan, terutama dalam Surah Al-Hujurat ayat 10, adalah untuk memberikan dasar bagi umat Islam untuk saling menjaga persaudaraan dan menghindari pertengkaran, serta mendorong mereka untuk saling membantu dan berbuat baik. Ayat ini menekankan

<sup>45</sup> Abu Bakr Jabir al Jazairi, Ensiklopedi muslim: Minhajul muslim. (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 38

bahwa semua orang beriman adalah saudara, sehingga mereka harus saling menjaga dan mendamaikan jika terjadi perselisihan.

Hadis tersebut menjelaskan tentang persudaraan setiap individu dan kelompok saling mendukung, membantu, dan melindungi hak masing-masing. Kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan kebaikan bersama, sebagaimana tubuh yang merespons jika salah satu anggotanya terluka. Pemerintahan yang didasarkan pada asas persaudaraan akan berupaya menjamin keadilan sosial.

Pemimpin berperan sebagai otak layaknya bagian tubuh berfungsi secara optimal tanpa ada bagian yang dibiarkan sakit atau terluka. dan ketika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasakannya. Begitu pula dalam politik, segala masalah yang menimpa satu kelompok harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, sehingga solusi dicari bersama sebagai cara mengambil keputusan. Ini mencerminkan hubungan saling menghormati dan mendengarkan di antara sesama.

Hadis ini menjadi fondasi nilai-nilai dalam Islam untuk membangun masyarakat yang saling mendukung, menjaga persaudaraan, dan menjunjung nilai kasih sayang, sehingga sistem politik yang dibangun berfungsi layaknya tubuh yang sehat dan utuh. Hal ini juga berguna untuk politik identitas dalam membangun persatuan di tengah keragaman dan mengingatkan agar identitas tidak disalahgunakan sebagai sumber perpecahan. Sebaliknya, identitas harus dikelola untuk menciptakan keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

## B. Politik yang Relevan Perspektif Hadis

Politik atau siyasah didalam Islam telah dipraktikkan dengan baik oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau telah mengajarkan kepada para sahabat tentang dunia perpolitikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terbukti dengan adanya Sejarah dan hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat hingga ke generasi kita. Berikut ini adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan siyasah atau dunia perpolitikan berdasarkan ajaran Islam selain hadits-hadits yang telah disebutkan di atas (hadis tentang kepemimpinan politik non muslim, hadis tentang kepemimpinan politik perempuan, hadis tentang interaksi dengan non muslim dan hadis tentang persaudaraan), antara lain:

### 1. Asas Keadilan

Amanah yang menjadi tanggung-jawab dunia akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَفْرَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Fudhail dari 'Athiyyah dari Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah 'Azza wa Jalla pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dari-Nya adalah seorang pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling keras siksananya adalah seorang pemimpin yang lalim,"* (HR. Ahmad 10745)<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif. tt)

Asas keadilan adalah prinsip dasar dalam hukum dan perundang-undangan yang memastikan setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Asbabul wurud, dalam konteks ini, merujuk pada latar belakang atau sebab-sebab yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan hukum atau regulasi yang berkaitan dengan keadilan. Hal ini membantu memahami konteks historis dan tujuan dari suatu aturan hukum terkait keadilan, sehingga penerapannya dapat lebih tepat dan efektif.

Pemimpin yang adil akan mendapatkan cinta dari Allah SWT, sedangkan pemimpin yang lalim akan menghadapi kebencian dan azab yang berat. Penekanan bahwa keadilan adalah sifat yang dicintai Allah menunjukkan nilai moral tertinggi yang harus diprioritaskan oleh siapa saja yang memegang jabatan. Pemimpin yang zalim menghancurkan tatanan masyarakat, menciptakan ketidakadilan, dan menimbulkan kerusakan sosial. Islam mengemukakan keras hal ini karena bertentangan dengan misi utama agama, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam Islam, menjadi pemimpin adalah amanah besar yang kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tetapi juga harus sadar bahwa kekuasaan yang diemban adalah titipan Allah.

Pemimpin yang adil dianggap sebagai simbol keutamaan karena ia menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berada di jalan yang diridai Allah. Kepemimpinan yang adil membawa keberkahan dan dicintai Allah, sementara kepemimpinan yang zalim membawa kehancuran, baik bagi pemimpin itu sendiri maupun masyarakatnya. Pemimpin harus selalu sadar akan tanggung

jawab besar yang diemban dan menggunakannya untuk memajukan keadilan, bukan sebaliknya.

Seperti halnya dalam politik identitas, bahwa pemimpin harus mengedepankan prinsip keadilan, mengelola keberagaman identitas dengan bijak, dan menghindari eksploitasi identitas untuk tujuan kekuasaan semata. Pemimpin yang mampu menjaga harmoni antaridentitas serta menjunjung tinggi keadilan akan dicintai Allah dan rakyatnya, sementara pemimpin yang menggunakan politik identitas untuk menindas atau memecah belah akan menghadapi kebencian dari Allah.

## 2. Asas Musyawarah

Betapa banyak ketidakompakan, ketidakpuasa, bahkan sampai kekacauan yang ditimbulkan karena sikap egois dan otoriter alias enggan bermusyawarah. Kasus ini sering kita jumpai, misalnya, pada kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Umar, *dia berkata, "Rasulullah SAW bermusyawarah semalaman dengan Abu Bakar tentang urusan kaum muslimin, dan aku bersamanya."* (HR. Ahmad 173).<sup>47</sup>

Asbabul wurud (alasan diundangnya) Asas Musyawarah dalam Islam adalah tentang pentingnya berunding dan mencari kesepakatan bersama dalam

---

<sup>47</sup> Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif. tt)

pengambilan keputusan, baik dalam urusan dunia maupun agama. Asas ini menekankan pada pentingnya menghargai pendapat dan aspirasi semua pihak yang terlibat untuk mencapai mufakat (kesepakatan) yang adil dan bijaksana.

Diskusi semalaman menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah SAW terhadap urusan kaum Muslimin. Beliau tidak hanya memutuskan sendiri tetapi juga mendengarkan pendapat sahabat terpercaya untuk kebaikan bersama. Hal ini adalah teladan bagi para pemimpin Muslim untuk selalu melibatkan orang bijak dan terpercaya dalam pengambilan keputusan, serta mengutamakan masalah umat di atas kepentingan pribadi.

Rasulullah SAW dalam mengurus urusan kaum Muslimin, melibatkan orang-orang yang memiliki pemahaman dan identitas yang kuat dalam komunitasnya seperti Abu Bakar. Ini menggambarkan pentingnya representasi berbagai identitas dalam musyawarah. Dalam politik identitas, individu atau kelompok tertentu berusaha menegaskan dan memperjuangkan hak dan kepentingannya. Dalam hal ini, Abu Bakar yang dipandang sebagai suara penting dari komunitasnya memiliki peran politik yang mendalam dalam keputusan yang dibuat untuk kepentingan umat.

Hal ini menyentuh nilai-nilai penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip politik identitas seperti musyawarah yang melibatkan berbagai suara untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam konteks politik identitas, keputusan kolektif yang melibatkan suara dari berbagai identitas dan kelompok menjadi sangat penting, dan prinsip ini tercermin dalam contoh musyawarah antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar.

### 3. Persatuan dan Kesatuan

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah salah satu peribahasa Indonesia tentang pentingnya persatuan. Kalimat tersebut selalu menjadi pengingat kita tentang dua hal. Pertama, sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bergotong-royong (bersama-sama). Kedua, suatu kelompok/kaum/bangsa akan menjadi kuat dan maju apabila tidak terpecah belah.

Rasulullah SAW pun pernah mengingatkan didalam salah satu sabdanya tentang pentingnya persatuan sebagaimana riwayat berikut.

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

Artinya:

Dari Abi Musa dari Nabi SAW beliau bersabda, “*Sungguh (sebagian) mukmin kepada (sebagian) mukmin lainnya seperti bangunan, yang menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya.*” Dan beliau menyilangkan jari-jarinya.” (HR. Al-Bukhari 459)<sup>48</sup>

Asbabul wurud (sebab-sebab turunnya) persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai latar belakang dan alasan mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting dan harus dijaga. Hal ini terkait dengan sejarah bangsa, kondisi geografis, keberagaman, dan ancaman yang mungkin terjadi jika persatuan tidak dijaga.

Kekuatan umat Islam terletak pada kerja sama dan persatuan yang kokoh di antara mereka. Setiap individu harus merasa terikat dengan sesama, tidak hanya secara moral tetapi juga secara praktis dengan memberi pertolongan dan dukungan. Begitu juga di masyarakat setiap kelompok harus memupuk rasa tanggung jawab

---

<sup>48</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), tt.

bersama untuk menjaga keharmonisan dan keberhasilan masyarakat. Pentingnya solidaritas dan rasa saling mendukung dalam umat Islam, yang pada akhirnya akan menghasilkan kekuatan yang kokoh seperti bangunan yang saling menguatkan setiap bagian.

Konteks politik identitas, kelompok sosial atau budaya sering kali memperjuangkan hak-haknya berdasarkan identitas mereka, misalnya agama, ras, atau etnis. Hadis ini mengajarkan kita bahwa umat Islam seharusnya seperti bangunan yang kokoh, di mana setiap individu atau kelompok mungkin memiliki identitas yang unik, mereka harus bergabung dalam persatuan yang saling menguatkan. Kekuatan sesungguhnya tercapai melalui kerjasama dan solidaritas di antara anggota kelompok.

Para pemimpin dalam kelompok harus berperan untuk menyatukan kelompok mereka, meskipun setiap kelompok memiliki perbedaan dalam hal strategi atau agenda, sebagaimana halnya Rasulullah SAW yang mengarahkan umat Islam agar saling bekerja sama dan menguatkan. Dalam politik identitas, menjaga kesatuan tanpa mengesampingkan identitas masing-masing adalah kunci dalam membangun masyarakat yang lebih adil.

#### **4. Asas Akhlak dalam Politik**

Apabila tingkah laku yang indah dan terpuji maka dinamakan akhlak yang baik dan ramah, sedangkan apabila yang lahir itu tingkah laku yang keji maka dinamakan akhlak yang buruk atau tercela. Sementara itu, dari pengertian antara etika, moral dan akhlak memiliki suatu perbedaan. Perbedaan antara etika, moral, dan akhlak dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk

yang digunakan. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa`il dari Abdullah radhiallahu'anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta." (HR Bukhari 5629).<sup>49</sup>

Asas akhlak dalam politik, atau etika politik, adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan dalam ranah politik. Asas ini penting karena menentukan bagaimana seorang politisi atau pemimpin bertindak dalam menjalankan kekuasaannya, serta bagaimana kebijakan yang dibuat mempengaruhi masyarakat. Penerapan asas akhlak dalam politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Kejujuran adalah nilai moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kejujuran merupakan salah satu sifat yang

<sup>49</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, Shahīh al- Bukhārī (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), tt

akan membawa seseorang kepada kebaikan. Memiliki hubungan yang sehat dan saling mempercayai dalam masyarakat tanpa kedustaan. Orang yang jujur akan selalu berada dalam kebaikan, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan dalam menjalankan kewajiban agama. Kebaikan ini merupakan salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan di akhirat.

Seperti halnya para pemimpin dalam politik mereka tidak boleh berdusta atau mengubah fakta hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kejujuran sangat penting dalam menyampaikan kebenaran, yang sering kali terlupakan. Dalam politik identitas kedustaan bisa merujuk pada usaha untuk menggunakan kebohongan atau manipulasi dalam membenarkan agenda tertentu. Jika seseorang atau kelompok berbohong tentang status, kebutuhan, atau keadaan mereka, ini bisa memengaruhi kepercayaan gerakan politik tersebut dan bisa memecah hubungan antara berbagai kelompok.

Perjuangan untuk pengakuan atau keadilan, kejujuran menjadi kunci bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan kredibilitas dan moralitas perjuangan mereka, sedangkan kedustaan hanya akan menjerumuskan mereka dalam kejahatan, baik secara moral maupun dalam pengaruh politik. Jika kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak mereka berlandaskan pada prinsip kejujuran, perjuangan mereka akan lebih diterima dan lebih mendalam dalam meraih keadilan, sedangkan kedustaan akan menghancurkan dari dalam.

## **5. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum**

Diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan (*kemaslahatan*) umat manusia di dunia

dan di akhirat. Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan (*kemaslahatan*) umat manusia di dunia dan di akhirat dapat terwujud maka segala ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus selalu sejalan dengan tuntunan syariat. Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) yang dibenarkan oleh syara'.

Hal tersebut dilandaskan pada hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya:

“Dari ‘Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi saw berkata kepadaku: ‘Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik’.” (HR Al-Bukhari 6613).<sup>50</sup>

Asas kepentingan umum dalam konteks asbabul wurud (penyebab berlakunya suatu hukum) berarti bahwa suatu hukum atau peraturan harus dibuat atau diubah karena ada kepentingan umum yang perlu dilindungi atau dipenuhi. Ini adalah prinsip yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk kesejahteraan dan kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.

<sup>50</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), tt.

Islam mendorong umat untuk berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan kerugian, bahaya, atau dampak negatif bagi orang lain. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan baik secara fisik maupun psikologis bagi individu dan masyarakat. Hal ini adalah prinsip dasar dalam etika sosial yang mengatur hubungan antar sesama umat manusia.

Politik identitas, perjuangan untuk pengakuan identitas dan hak-hak kelompok tertentu tidak boleh sampai menyebabkan bahaya atau kerugian bagi orang lain. Kita harus tetap menjaga martabat dan hak asasi setiap individu atau kelompok tidak ada satupun pihak yang boleh diperlakukan sebagai objek atau menjadi sasaran kerusakan dalam nama perjuangan identitas. Salah satu tantangan dalam politik identitas adalah ketika perbedaan identitas dipolitisasi secara ekstrem hingga menciptakan kebencian dan permusuhan antar kelompok.

Hadis ini menekankan etika hidup yang penting dalam Islam, yaitu bahwa tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri atau orang lain. Prinsip ini mendukung penciptaan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan menjauhi kebiasaan atau tindakan yang dapat membawa bahaya, umat Islam dapat hidup dalam kedamaian, menjaga kehormatan, kesehatan, serta keselamatan bersama. Perjuangan untuk pengakuan dan keadilan bagi kelompok tertentu seringkali melibatkan berbagai langkah sosial, politik, dan budaya, yang bisa berpotensi menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, Adapun politik identitas perspektif hadits antara lain:

#### **1. Bentuk Politik Identitas Perpektif Hadis**

##### **a. Asas Kesetaraan**

Asas kesetaraan terlebih dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Qur'an dan Syariah yang dibawanya. Tentunya politik identitas yang dilakukan oleh Rasul demi kemashlahatan ummat muslim agar tetap bersatu dan berpegang teguh pada ajaran yang ditinggalkannya.

##### **b. Asas tidak Melihat Gender**

Dilarangnya seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Rahasia di balik dilarangnya seorang perempuan menjadi pemimpin adalah karena seorang perempuan adalah sosok yang lemah dan mempunyai beberapa kekurangan. Rasulullah telah mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai beberapa kekurangan yaitu kekurangan dalam aspek akal serta agama.

##### **c. Asas boleh berinteraksi dengan non muslim**

Seorang non muslim wajib menta'ati perintah pemimpin muslim meskipun ia tidak menyukai apa yang diperintahkan, selagi perintah tersebut tidak melanggar syari'at dan tidak berlawanan dengan akidah Islam. Namun, jika perintah tersebut telah melanggar syari'at dan Aqidah, maka gugurlah kewajiban ta'at kepada pemimpin muslim tersebut.

d. Asas tentang persaudaraan

Hakikat hubungan antara sesama kaum muslimin yang begitu eratnya menurut Islam. Hubungan antara mereka dalam hal kasih sayang, cinta dan pergaulan diibaratkan hubungan antara anggota badan, yang satu sama lainnya saling membutuhkan, merasakan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling melengkapi. Bangunan tidak akan berdiri kalau salah satu komponennya tidak ada ataupun rusak. Hal itu menggambarkan betapa kokohnya hubungan antara sesama umat Islam.

## **2. Politik yang Relevan Perspektif Hadis**

a. Asas Keadilan

Kepemimpinan yang mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di mata hukum, dan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya akan mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan maju. Kesadaran hukum masyarakat hanya bisa tercipta ketika pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas keberpihakan kepada kebenaran. Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak dharar dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu

mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketenteraman bagi rakyat.

b. Asas Musyawarah

Musyawarah mendekatkan kita pada sikap egaliter, rendah hati, dan terbuka secara wawasan. Dan inilah yang dicontohkan Rasulullah sebagai pembawa risalah suci. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang gemar bermusyawarah, khususnya untuk urusan yang dampaknya bukan pada diri kita sendiri. Dengan demikian kita terjaga dari kecerobohan mengambil kebijakan, egoisme, dan perpecahan.

c. Persatuan dan Kesatuan

Besarnya hak sebagian mukmin kepada sebagian lainnya, serta motivasi kepada mereka akan pentingnya saling berkasih sayang, berempati, dan bahu membahu tidak di dalam dosa dan hal-hal yang tidak patut. Khususnya bagi sesama muslim yang seharusnya saling menyayangi, mencintai, menguatkan, berempati, dan tolong menolong satu dengan lainnya dalam kebaikan. Bukan malah sebaliknya, saling menghina, mencaci, dan menjatuhkan satu dengan lainnya.

d. Asas Akhlak dalam Politik

Akhlak berkaitan erat dengan iman. Orang berakhlak dipenuhi sifat sabar, jujur, syukur, pemurah, tawadhu', dan tawakal. Semua itu merupakan akhlak mulia, yang Allah ta'ala dan Rasulullah SAW perintahkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ahlussunnah berkeyakinan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Apabila iman bertambah berarti orang tersebut melaksanakan

cabang-cabang keutamaan akhlak yang mulia. Jika iman turun berarti orang tersebut melakukan akhlak yang jelek (yang tidak disenangi oleh Islam).

e. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum

Sikap integritas dan bebas dari korupsi adalah fondasi utama dalam etika pejabat publik yang harus dipraktikkan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, konsistensi, dan ketulusan dalam tindakan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan dapat dipercaya. Dalam Islam, pentingnya integritas, kompetensi, keadilan, dan integritas moral yang kuat sangat ditekankan, terutama bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Adapun bentuk politik identitas perfektif hadis yaitu menunjukkan kesetaraan, tidak melihat terhadap gender, boleh berinteraksi dengan non muslim, tidak membedakan interaksi antar agama dan persaudaraan.
2. Adapun politik relevan Perspektif Hadis berdasarkan 5 asas: Pertama, asas keadilan berdasarkan hadis riwayat Ahmad 10742. Kedua, asas musyawarah berdasarkan hadis riwayat Ahmad 173. Ketiga, asas persatuan dan kesatuan berdasarkan hadis riwayat Bukhari 459 dan 4685. Keempat, asas akhlak dalam politik berdasarkan hadis riwayat Muslim 3404 dan Bukhari 3629. Kelima, asas mengutamakan kepentingan umum berdasarkan hadis riwayat Ibnu Maja 2341 dan Bukhari 6613.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Al-Qur'an sebagai pedoman umat telah banyak memberikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam skripsi ini mengkaji tentang memilih pemimpin non-Muslim. Diharapkan dalam penelitian ini bermanfaat bagi

pembaca serta dapat menempatkan bagaimana seharusnya hubungan umat muslim dengan non-Muslim khususnya dinegara kita Indonesia.

2. Bagi para tokoh agama, hendaknya memiliki kehati-hatian dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terlebih yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan dan hubungan sosial dengan komunitas pemeluk agama lain (non-Muslim) agar terciptanya kerukunan antar umat beragama yang dibungkus dalam bingkai toleransi.
3. Bagi kaum muslimin seyogyanya memberikan penilaian yang objektif terhadap kalangan non-muslim, sesuai penilaian yang telah diberikan oleh Al-Qur'an. Diharapkan dengan itu dapat meminimalisir kesalah pahaman dan menghilangkan pandangan negatif terhadap kalangan non-muslim, sehingga kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam bingkai kemajemukan masyarakat.